



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA.BTM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara  
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan  
sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**R. Riki Ariansyah Bin R. Basaruddin**, umur 28 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di  
Kampung Tua Tanjung Uma, No.83, RT.02 RW.01,  
Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota  
Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan**

**Dian Anggraini Binti Agung Ediwayono**, umur 24 tahun, agama Islam  
, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal  
di Kavling Asrama Polisi Bengkong, No.43 RT.02  
RW.11, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan  
Bengkong, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama Batam;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 15 Februari  
2016 mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 hal/ Putusan No.0276/Pdt.G/2016/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam Register Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA.BTM tanggal 15 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 064/21/11/2011 tanggal 11 Februari 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Bengkong, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai orang anak yang bernama:
  - a. R.M. Rafkha Ridho Riansyah Bin R.Riki Ariansyah, umur 5 tahun
  - b. R. Khaira Fayola Nadifa Riansyah Binti R.Riki Ariansyah, umur 4 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan kemudian sering berselisih paham dan berbeda pendapat dalam hal-hal untuk mengurus rumah tangga;
  - b. Bahwa Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2015, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2015;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (R. Riki Ariansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Anggraini Binti Agung Ediwayono) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir in-person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dimediasi oleh Hakim mediator karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, tetapi Pemohon dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa Fotokopi yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 064/21/11/2011 tertanggal 11 Februari 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan keluarga yang sekaligus bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Arianto Bin La Aru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, mereka melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2011, dari dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena sifat Termohon yang suka membantah perkataan Pemohon;

- Bahwa penyebab lainnya yaitu sifat Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;
- 2. Candra Suryadi Bin Abdi Ibrahim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah juga saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, mereka melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2011, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena sifat Termohon yang suka membantah perkataan Pemohon;
  - Bahwa penyebab lainnya yaitu sifat Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
  - Bahwa saksi sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad hati untuk menceraikan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Pemohon tidak dimediasi karena Termohon tidak datang dalam persidangan dan Pemohon hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir in-person, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (Vide P.) bukti tersebut sebagai **Conditio sine quannon** dalam perkara ini. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon di pandang pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tal"A.In 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula dipandang mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bennohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam dengan alasan antara Pemohon dan Tenothon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya perselisihan yang terus berlanjut dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Tenothon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., i.e. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, sebagaimana telah dipertimbangkan dahulu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah sifat Termohon yang suka membantah perkataan Pemohon, bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung, karena perselisihan mana terlihat dari sikap Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis dan tidak satu rumah lagi, dan tidak selayaknya sebagai pasangan suami isteri, sehingga keterangan kedua orang saksi dimaksud dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa *jj S.l.,: r' i j lf.:il) l.3it•J*, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jis.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut hanya sebagai pemenuhan pertanggung jawaban saja, bukan karena ingin membina rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri seperti yang dikemukakan di atas. Oleh karena itu perkawinan yang demikian dipandang sudah tidak utuh lagi, juga tidak sejalan dengan *sunnah* dilaksanakan perkawinan, karena perkawinan yang demikian malah mendatangkan kemafsadatan sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum pernah bercerai;

- Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken* maniage) dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Pemohon. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *Al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *e;n...i1 > r.i1.. i....l!..11 tsJJ* Artinya: *"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, sa/ah satu pihak tidak bemiati meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasa/ 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo Pasa/ 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya akan membawa perselisihan yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**R. Riki Ariansyah Bin R. Basaruddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Anggraini Binti Agung Ediwayono**), di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M., bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. NURZAUTI, S.H., M.H. dan Ora. SITI KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUKTI ALI, S.Ag., MH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.



Ketua Majelis,

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

HakimA

Dra. SITI KHADIJAH

Panitera,

MUKTI ALI, S.Ag.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 245.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 336.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)